

Analisis Potensi Mata Uang BRICS dalam Menantang Dominasi Dolar AS dalam Perspektif Ekonomi Moneter Islam: Keunggulan dan Tantangan

Syaifullah

Universitas Airlangga, Surabaya

syaifullah-2022@feb.unair.ac.id

Keywords:

*BRICS, Foreign Policy,
Islamic Monetary*

Kata Kunci:

BRICS, Kebijakan Luar
Negeri, Moneter Islam

ABSTRACT

This research aims to analyze the potential of the BRICS currency in challenging the dominance of the US dollar from the perspective of Islamic monetary economics. The study examines the advantages and challenges associated with the emergence of the BRICS currency as an alternative to the US dollar in international trade and finance, focusing on the principles of Islamic monetary economics, which emphasize justice, stability, and sustainability. A qualitative method is used in this research, with data sourced from journals, books, and articles. The main analytical tools are exchange rates and foreign policy. The research findings indicate that the potential emergence of the BRICS currency is driven by longstanding dependence on the hegemony of the US dollar, which benefits the US more than developing countries. However, the BRICS currency is deemed less potential due to the need for substantial financial infrastructure and competition with the World Bank. Therefore, BRICS should consider an Islamic financial system based on principles of justice, sustainability, and economic independence.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis potensi mata uang BRICS dalam menantang dominasi dolar AS dari perspektif ekonomi moneter Islam. Studi ini mengkaji keunggulan dan tantangan munculnya mata uang BRICS sebagai alternatif dolar AS dalam perdagangan dan keuangan internasional, dengan fokus pada prinsip-prinsip ekonomi moneter Islam yang menekankan keadilan, stabilitas, dan keberlanjutan. Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini, dengan data dari jurnal, buku, dan artikel. Alat analisis utama adalah nilai tukar dan kebijakan luar negeri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi munculnya mata uang BRICS disebabkan oleh ketergantungan terhadap hegemoni dolar AS yang lebih menguntungkan AS daripada negara berkembang. Namun, mata uang BRICS dinilai kurang potensial karena membutuhkan infrastruktur keuangan besar dan harus bersaing dengan Bank Dunia. Oleh karena itu, BRICS sebaiknya mempertimbangkan sistem keuangan Islam yang berprinsip pada keadilan, keberlanjutan, dan kemandirian ekonomi.

PENDAHULUAN

BRICS adalah forum kerjasama global yang bersifat non-formal yang meliputi beberapa negara-negara EME (*Emerging Market Economy*) tertentu dengan pertumbuhan ekonomi pesat yang tergabung pada satu grup, yakni: Brazil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan (Arapova & Lissovolik, 2021). Grup ini juga disebut sebagai entitas geopolitik formal yang memiliki KTT tahunan dan mempunyai kegiatan koordinasi kebijakan. Dengan merepresentasikan negara-negara tersebut, saat ini BRICS setidaknya memegang sekitar \$4 triliun cadangan devisa dunia (*global foreign reserves*) dan mewakili sepertiga populasi dunia (Bag & Das, 2024). Selain itu, penyebutan BRICS memiliki perkembangannya, dan sebelumnya disebut sebagai BRIC dikarenakan Afrika Selatan baru bergabung dengan grup tersebut pada tahun 2010 (SouthAfrica.info 2011).

Sebutan BRIC merupakan sebuah sebutan akronim yang diciptakan oleh ekonom Jim O'Neill pada tahun 2001, yang kala itu menjabat sebagai kepala penelitian ekonomi global di Goldman Sachs, untuk menyebut negara Brazil, Rusia, India, dan Tiongkok. O'Neill mempercayai bahwasanya pengelompokan BRIC ini nantinya mampu menyaingi dominasi negara-negara G7 pada tataran ekonomi global (Rao & Padhi, 2020). Berdasarkan *Hang Seng China Enterprises Index* (HSCEI) pada tahun 2007, BRIC telah membuktikan kontribusinya dengan kenaikan nilai pasar ekuitas sebesar 817% kepada ekonomi global (De Callataÿ, 2013). Hal ini membuktikan BRIC pada awal kebangkitannya mengalami kepesatan pertumbuhan ekonomi yang sangat tajam. BRICS sampai saat ini memiliki KTT tahunan dengan fokus pembahasan yang intens terhadap ekonomi global.

Pada KTT ke-14 BRICS tahun 2022, Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan bahwasanya grup dengan lima negara dengan PDB yang apabila digabung sebesar hampir \$18 triliun tersebut sedang mengembangkan mata uang cadangan global baru (*new global reserve currency*) sebagai cara alternatif dalam mekanisme pembayaran global (Rao & Padhi, 2020). Mata uang cadangan baru tersebut nantinya diyakinkan akan menjadi cara alternatif pembayaran global, khususnya akan menggeser penggunaan komponen cadangan devisa *Special Drawing Rights* (SDR) yang difasilitasi oleh Dana Moneter Internasional (IMF), yakni mata uang yang berdenominasi euro, yen, pound sterling dan dolar AS (He et al., 2020; Naresh et al., 2018).

Negara-negara BRICS tidak diragukan lagi memiliki beberapa tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia. kekokohan inisiatif de-dollarisasi kolektif BRICS, hal itu menunjukkan bahwa BRICS telah menggunakan “keahlian keuangan kolektif” untuk menantang tatanan internasional liberal yang ada (Phiri, 2022). Secara khusus, institusi seperti NDB dan CRA adalah contoh mobilisasi kolektif BRICS untuk mereformasi tata kelola keuangan global (Coquidé et al., 2023; Mittal et al., 2019). BRICS tidak hanya mengubah struktur kekuatan tradisional dalam sistem yang ada, seperti Organisasi Perdagangan Dunia, tetapi juga berfungsi sebagai dasar bagi koalisi negara berkembang yang lebih luas untuk menantang hegemoni AS (Qabhobho, 2023).

Pertumbuhan PDB rata-rata mereka selama dekade terakhir berada di atas 6,5%, dan kontribusi keseluruhan mereka terhadap PDB global lebih dari 23% (Wang et al., 2019). Kebutuhan akan diperlukannya mata uang cadangan baru yang sedang diproposisikan oleh negara BRICS tersebut sudah direncanakan sejak setelah diadakannya KTT pertama BRIC di Yekaterinburg pada tanggal 16 Juni 2009 (kala itu Afrika Selatan belum bergabung), yang menegaskan tentang bagaimana negara-negara BRIC menekankan pentingnya mata uang cadangan global baru yang dapat diversifikasi, stabil, dan mudah diprediksi. Ini menunjukkan negara BRIC sejak itu mulai pudar kepercayaannya terhadap mata uang dolar AS sebagai mata uang cadangan dunia. Sedangkan menurut Kodaki (2022), mata uang cadangan yang baik (*a good reserve currency*) itu harus memiliki 3 prinsip, yakni: “*safety, liquidity, and return*”.

Kendati demikian, dolar AS yang telah lama digunakan untuk mekanisme sistem pembayaran global malah rentan terhadap ketidakstabilan bahkan menghantarkan pada keuangan global. Hal ini dibuktikan dengan lemahnya peran dolar AS sebagai mata uang cadangan dominan dunia yang telah berkali-kali menghadapi siklus depresiasi (*cyclical depreciations*), seperti pada kasus terjadinya krisis pada tahun 1977-79, 1985-88, 1993-95, dan 2007-08 (Reuters 2009; Forbes 2009). Oleh karena itu, adanya ide mata uang cadangan baru tersebut akan membuat hegemoni dolar AS tergeser sebagai alat tukar ekonomi global. Hal ini juga menandakan bahwa BRICS telah lama menjadi grup entitas politik global yang kerap mengkritik dominasi Barat terhadap tata kelola keuangan global. Salah satu dominasi Barat terhadap tata kelola keuangan global adalah dapat dilihat dengan adanya perjanjian Bretton Woods yang menghasilkan pemberlakuan sistem persyaratan perdagangan dan keuangan global selama hampir 8 dekade terakhir.

Hal ini bertujuan untuk membuat sistem transaksi mata uang asing lebih efisien, mencegah devaluasi mata uang secara kompetitif, dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi global (Dharma et al., 2024; Nuryadin et al., 2023; Yuan & Chen, 2015). Dengan begitu, sistem tersebut mendirikan tiga rezim dan institusi sebagai regulator ataupun infrastruktur keuangan global yakni IMF, Bank Dunia, dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Melalui ketentuan regulasi IMF, semua mata uang negara anggota perjanjian Bretton Woods harus ditetapkan nilai kesepadanannya (*parity price*) terhadap dolar AS atau bisa juga terhadap emas dengan nilai ekuivalennya. Sedangkan ketetapan nilai konvertibel mata uang dolar AS terhadap emas adalah 1 ons emas = \$35 (Saragih 2016). Ini menunjukkan bagaimana negara Barat dapat mendominasi tata kelola keuangan global melalui rezim keuangannya. Untuk menyaingi dominasi tata kelola keuangan tersebut, BRICS membentuk *New Development Bank* (NDB) dan *Contingent Reserve Arrangement* (CRA) pada KTT BRICS ke-5 tahun 2013, sebagai saingan baru bagi institusi Bank Dunia dan IMF, guna memperkuat sistem keuangan nasional negara anggota (Peter Leo Deepak & Amudha, 2017).

Tujuan utamanya adalah memobilisasi “sumber daya infrastruktur dan proyek-proyek pembangunan yang berkelanjutan di BRICS, negara-negara *emerging economy* serta negara berkembang”. Lebih lanjut, motivasi pembentukan institusi-institusi ini juga bertujuan untuk menghindari bias peminjaman keuangan terhadap negara-negara berkembang dalam pembangunan ekonomi nasionalnya. Selain itu, perspektif ekonomi moneter Islam juga menjadi faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam analisis ini. Peran mata uang dalam ekonomi moneter Islam meliputi aspek keadilan, keseimbangan, stabilitas, dan kemandirian ekonomi. memiliki implikasi yang signifikan dalam merumuskan alternatif sistem keuangan global yang lebih inklusif dan adil (Naresh et al., 2018).

TINJAUAN PUSTAKA

Nilai Tukar

Nilai tukar merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi neraca perdagangan di suatu negara. Jika nilai mata uang terdepresiasi, maka ekspor akan meningkat dan pada akhirnya posisi neraca perdagangan akan surplus. Sebaliknya, jika nilai mata uang terapresiasi, maka impor akan meningkat sehingga neraca perdagangan akan defisit menurun (Triyawan et al., 2022). Dalam kondisi tertentu, kenaikan dan penurunan nilai tukar mata uang terjadi atas intervensi pemerintah, dalam hal ini kebijakan bank sentral dalam menaikkan dan menurunkan nilai tukar mata uang domestik untuk menyesuaikan dengan nilai tukar mata uang yang sebenarnya di pasar (Belke & Kronen, 2019). Penyesuaian ke atas atau kenaikan nilai tukar mata uang yang dilakukan oleh bank sentral disebut dengan revaluasi. Sedangkan, penyesuaian ke bawah atau penurunan nilai tukar mata uang yang dilakukan oleh bank sentral disebut dengan devaluasi. Dolar sebagai cadangan mata uang dunia berawal dengan keputusan (Syaifullah et al., 2024).

Perjanjian Bretton Woods tahun 1944 setelah 44 negara setuju sepakat agar bank sentral mempertahankan nilai tukar tetap antara nilai mata uang mereka dan dolar AS. Perjanjian Bretton Woods memiliki sebuah sistem yang dimana mata uang dolar AS menggunakan standar emas sementara nilai mata uang lain harus dikaitkan dengan nilai dolar AS dan sistem ini mulai berjalan penuh pada tahun 1958. Sistem Bretton Woods ini hanya mampu bertahan selama 13 tahun, pada tahun 1971 secara resmi sistem ini dibubarkan karena dunia mulai curiga atas cadangan emas negara Amerika Serikat. Pasca runtuhnya sistem Bretton Woods, muncul berbagai sistem pertukaran mata uang negara diantaranya kurs mengambang, kurs tetap, dan campuran keduanya. Namun warisan Bretton Woods seperti Bank Dunia dan IMF masih mempengaruhi sistem kurs dunia, tercatat mata uang dolar AS menjadi cadangan bank asing pada tahun 2021 sebanyak 61% (Diniz-Maganini et al., 2023).

Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya faktor internal dan eksternal. Selain itu kebijakan luar negeri merepresentasikan *interest* dari negara tersebut (Yuan & Chen, 2015). Hal tersebut meliputi berbagai aspek seperti perekonomian, stabilitas keamanan, hingga kepentingan dalam elit politik. Setiap negara bebas menentukan kemana arah kebijakan sesuai dengan tujuan dan haluan yang diinginkan, namun setiap negara juga wajib menyadari akan kepentingan negara lain yang juga harus dihargai sehingga tidak adanya intervensi yang menimbulkan ancaman ancaman maupun memicu terjadinya keresahan dalam stabilitas keamanan (Cooper, 2017). Meskipun bukan merupakan organisasi internasional, BRICS merupakan kelompok pengambil kebijakan dalam level negara yang menjadi faktor internal bagi Kebijakan luar negeri sedangkan faktor eksternal dapat dipengaruhi oleh ancaman/tekanan dari negara lain, persuasi, dan diplomasi. Pengaruh lainnya yaitu perumusan kebijakan luar negeri harus sejalan dengan salah satu tuntutan yang harus dijalankan oleh negara anggota dalam waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan, dalam arti lain setiap negara harus dalam keadaan sama-sama sepakat (Topcu et al., 2020).

BRICS sempat mengadakan KTT mengenai pembahasan perencanaan mata uang BRICS, dari hasil KTT tersebut menimbulkan respon global diantaranya rencana Arab Saudi, Turki, dan Mesir disinyalir akan menjadi anggota baru resmi BRICS (Mroua & Trabelsi, 2020). Jelas, hal tersebut menjadi sebuah tekanan dari negara lain yang dapat mempengaruhi pengambil keputusan. Selain itu, sanksi terhadap Rusia terhadap pemblokiran aset keuangan global dan pemblokiran dalam SWIFT, sebuah sistem pembayaran global, membuat Rusia terhambat dalam jalur transaksi keuangan global. Hal ini menyadarkan negara-negara terkhusus Tiongkok untuk berjaga-jaga mempertahankan stabilitas mata uang negaranya (Bidin et al., 2009).

Peran Mata Uang dalam Sistem Moneter Islam

Dalam ekonomi moneter Islam, mata uang memainkan peran penting sebagai alat tukar, penyimpan nilai dan ukuran nilai. Mata uang juga berfungsi sebagai media transaksi yang memperlancar kegiatan ekonomi masyarakat muslim. Namun, peran mata uang dalam ekonomi moneter Islam melampaui fungsi praktis, tetapi juga terkait dengan prinsip dan nilai ekonomi Islam yang lebih luas (Asfarina et al., 2019). Salah satu prinsip utama dalam ekonomi moneter Islam adalah larangan riba atau bunga. Riba dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan ekonomi dalam Islam (Anjum 2022). Oleh karena itu, mata uang dalam ekonomi moneter Islam harus bebas dari unsur riba. Dalam praktiknya, hal ini berarti menghindari praktik pembebanan bunga atas pinjaman atau transaksi keuangan lainnya. Mata uang yang beroperasi sesuai dengan prinsip ekonomi moneter Islam akan

menjamin keadilan dalam transaksi ekonomi dan menghindari eksploitasi yang mungkin timbul dari bunga (Purnamasari 2022).

Secara keseluruhan, peran mata uang dalam ekonomi moneter Islam meliputi aspek keadilan, keseimbangan, stabilitas, dan kemandirian ekonomi. Mata uang yang sesuai dengan prinsip ekonomi moneter Islam akan memainkan peran penting dalam menciptakan sistem keuangan yang adil, berkelanjutan, dan mandiri bagi masyarakat Muslim (Putra 2022). Dalam menganalisis potensi mata uang BRICS dalam menantang dominasi dolar AS dalam perspektif ekonomi moneter Islam, penting untuk mempertimbangkan sejauh mana mata uang BRICS dapat memenuhi prinsip-prinsip tersebut dan memberikan alternatif yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam. dalam konteks moneter global (Yusuf 2023).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian sistem analisis data kualitatif dengan proses pengumpulan data, proses interpretasi data, dan juga penulisan narrative reporting melalui sumber data sekunder meliputi komentar, interpretasi atau pembahasan tentang materi original seperti buku, dan jurnal ilmiah (Agustianti et al., 2022). Penggunaan desain kualitatif ini bertujuan untuk membangun pemahaman melalui penjelasan yang bersumber dari beberapa literatur seperti jurnal, buku, dan artikel-artikel. Dalam mengukur bagaimana adanya potensi kemunculan mata uang BRICS, analisis data kualitatif dan sumber data sekunder cukup membantu penelitian dalam menganalisis potensi tersebut melalui landasan teoritis penelitian sebagai pisau analisis (Thaker, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keunggulan Negara BRICS

Pertumbuhan ekonomi yang pesat dan stabilitas keuangan yang relatif tinggi di negara-negara BRICS merupakan faktor penting dalam mendorong potensi mata uang BRICS sebagai alternatif terhadap dominasi dolar AS. Negaranegara BRICS memiliki ekonomi yang besar dan terdiversifikasi, dengan pertumbuhan yang signifikan selama beberapa dekade terakhir (Larionova & Shelepov, 2022). Misalnya, Tiongkok dan India merupakan dua ekonomi terbesar di dunia, sedangkan Brasil dan Rusia juga memiliki peran penting dalam ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi yang kuat ini memberikan landasan yang kokoh bagi mata uang BRICS untuk menjadi alternatif yang menarik dalam sistem moneter internasional (Aroul & Swanson, 2018).

Selain pertumbuhan ekonomi yang pesat, stabilitas keuangan juga menjadi aspek penting dalam mendorong potensi mata uang BRICS. Negara-negara BRICS telah mengambil langkah-langkah untuk memperkuat stabilitas keuangan domestik mereka, termasuk pengaturan yang ketat terkait kebijakan moneter, keuangan, dan regulasi pasar (Larionova & Shelepov, 2022). Misalnya, Tiongkok telah mengimplementasikan kebijakan yang bertujuan untuk menjaga stabilitas mata uang mereka dan mengendalikan risiko sistemik. Brasil juga telah melakukan reformasi kebijakan ekonomi dan fiskal untuk meningkatkan stabilitas keuangan negaranya. Stabilitas keuangan yang terjaga memberikan kepercayaan kepada investor dan menguatkan potensi mata uang BRICS dalam menantang dominasi dolar AS (Latino, 2017).

Selain itu, negara-negara BRICS juga terlibat dalam kerja sama regional dan inisiatif ekonomi yang bertujuan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keuangan. Contohnya adalah Pendekatan Keuangan BRICS (BRICS Financial Cooperation), yang bertujuan untuk memperkuat kerja sama dalam sektor keuangan dan moneter di antara negaranegara BRICS. Melalui kerja sama ini, negara-negara BRICS saling mendukung dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan mengembangkan instrumen keuangan yang dapat

mengurangi ketergantungan pada dolar AS. Kerja sama ini juga memberikan kesempatan bagi mata uang BRICS untuk menjadi lebih terintegrasi dalam sistem keuangan regional dan internasional (Rehman & Islam, 2023).

Artikel *Can BRICS Form a Currency Union? An Analysis under Markov Regime-Switching Framework* (2019) mengatakan bahwa Pertumbuhan ekonomi yang pesat dan stabilitas keuangan yang relatif tinggi di negara-negara BRICS memberikan landasan yang kuat bagi potensi mata uang BRICS dalam menantang dominasi dolar AS. Pertumbuhan ekonomi yang kuat, stabilitas keuangan yang terjaga, dan kerja sama regional yang erat menjadi faktor penentu dalam memperkuat posisi mata uang BRICS dalam sistem moneter internasional. Meskipun masih menghadapi beberapa tantangan, potensi mata uang BRICS dalam menantang dominasi dolar AS semakin menguat, dan akan menarik untuk melihat bagaimana negara-negara BRICS mengembangkan kerja sama (Larionova & Shelepov, 2022).

Dampak Isu Mata Uang BRICS terhadap Ekonomi Dunia

Keberadaan mata uang BRICS sebagai potensi alternatif terhadap dominasi dolar AS memiliki dampak yang signifikan terhadap ekonomi dunia. Pertama, kehadiran mata uang BRICS dapat mengurangi ketergantungan negaranegara di luar BRICS terhadap dolar AS sebagai mata uang cadangan dan alat pembayaran internasional. Hal ini dapat membantu mengurangi risiko dan kerentanan yang timbul akibat fluktuasi nilai tukar dolar AS dan perubahan kebijakan moneter AS yang berdampak luas. Mata uang BRICS yang lebih kuat dan terintegrasi dapat membantu memperkuat perdagangan intra-BRICS dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan dalam kelompok negara ini. Dengan mengurangi ketergantungan pada dolar AS, negara-negara BRICS dapat meningkatkan stabilitas dan ketahanan ekonomi mereka, serta memperluas akses ke pasar internasional bagi produk dan jasa mereka (Caporale et al., 2017).

Dampak lainnya adalah meningkatnya keberagaman dan pluralitas dalam sistem moneter internasional. Dominasi dolar AS selama ini telah menyebabkan ketidakseimbangan dan risiko sistemik (Galesi et al 2019). Keberadaan mata uang BRICS sebagai alternatif dapat membawa keberagaman yang lebih seimbang dalam sistem moneter internasional, memberikan pilihan yang lebih luas bagi negara-negara untuk melakukan transaksi internasional dan mengelola risiko ekonomi (Moisseev 2021).

Namun, dampak mata uang BRICS juga dapat menimbulkan tantangan. Perkembangan mata uang BRICS yang lebih kuat dapat mengakibatkan apresiasi nilai tukar, yang mungkin mengurangi daya saing ekspor negara-negara BRICS dan meningkatkan impor (Nakajima et al 2020). Selain itu, stabilitas nilai tukar dan kepercayaan terhadap mata uang BRICS juga perlu dijaga melalui kebijakan moneter yang konsisten dan koordinasi kebijakan yang efektif antara negaranegara BRICS.

Keunggulan Kolaborasi Mata Uang BRICS dengan Sistem Keuangan Islam

Kolaborasi dalam pembuatan mata uang BRICS dan keuangan Islam memiliki pentingnya yang signifikan dalam menghadapi tantangan ekonomi dan menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Pertamatama, kolaborasi ini dapat memberikan fondasi yang kuat untuk mengembangkan mata uang BRICS yang mengikuti prinsip-prinsip keuangan Islam. Keuangan Islam, yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, menekankan keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip ini, mata uang BRICS dapat menjadi alternatif yang kuat terhadap sistem keuangan konvensional yang sering kali dianggap tidak adil dan rentan terhadap krisis (Hasan & Syahrudin, 2022).

Selanjutnya, kolaborasi ini dapat memperluas akses keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan. Keuangan Islam telah terbukti menjadi sarana yang efektif dalam memperluas inklusi keuangan dan memberdayakan kelompok-kelompok ekonomi yang lebih lemah. Dalam konteks mata uang BRICS, hal ini berarti memastikan bahwa sistem keuangan yang dibangun didasarkan pada prinsip-prinsip keuangan Islam yang inklusif, sehingga semua lapisan masyarakat dapat memiliki akses yang adil dan merata terhadap layanan keuangan (Saji, 2019). Selain itu, kolaborasi ini dapat memperkuat hubungan ekonomi antara negara-negara anggota BRICS dan negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip keuangan Islam dalam mata uang BRICS, kolaborasi ini dapat menciptakan peluang perdagangan dan investasi yang lebih besar antara negara-negara tersebut. Hal ini juga dapat meningkatkan pertukaran pengetahuan dan pengalaman dalam pengembangan instrumen keuangan syariah, sehingga negara-negara anggota BRICS dapat saling mendukung dalam mengembangkan ekonomi berbasis syariah yang kuat.

Secara keseluruhan, kolaborasi dalam pembuatan mata uang BRICS dan keuangan Islam memiliki potensi yang signifikan dalam menciptakan sistem keuangan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan menggabungkan kekuatan ekonomi BRICS dengan prinsip-prinsip keuangan Islam, kolaborasi ini dapat memberikan alternatif yang kuat terhadap sistem keuangan konvensional yang sering kali dikritik atas ketidakadilan dan tidakberkelanjutannya. Kolaborasi ini juga dapat memperkuat hubungan ekonomi antara negaranegara anggota BRICS dan negara-negara Muslim, serta memberikan dampak positif dalam memperluas akses keuangan dan membangun ekonomi yang inklusif di seluruh dunia (Abdallah, 2022).

Kritik Ekonomi Islam terhadap Dominasi Dolar

Dalam perspektif ekonomi moneter Islam, dominasi dolar AS sebagai mata uang dunia telah menjadi objek kritik yang signifikan. Kritik terhadap dominasi dolar AS terkait dengan ketidakadilan dan ketimpangan yang dihasilkan oleh sistem moneter internasional saat ini. Posisi dominan dolar AS memberikan keuntungan ekonomi dan kekuatan politik yang tidak seimbang kepada AS, sementara negara-negara lain menjadi lebih rentan terhadap fluktuasi nilai tukar dan kebijakan moneter AS (Naresh et al., 2018). Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan ekonomi dalam Islam yang menekankan kesetaraan dan keadilan dalam hubungan ekonomi antarnegara.

Kritik terhadap dominasi dolar AS dalam perspektif ekonomi moneter Islam berkaitan dengan pengaruh sistem ribawi (bunga) yang melekat pada sistem keuangan yang didominasi oleh dolar AS. Islam melarang riba dan mendorong sistem keuangan yang berbasis pada prinsip syariah, seperti pembiayaan berdasarkan bagi hasil (profit-sharing) dan transaksi yang adil. Namun, dominasi dolar AS yang didukung oleh sistem keuangan yang ribawi telah memperkuat praktik bunga dan instrumen keuangan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Alam et al., 2022).

Kritik terhadap dominasi dolar AS dalam perspektif ekonomi moneter Islam adalah terkait dengan peran dolar AS dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri dan politik ekonomi negara-negara lain. Ketergantungan negara-negara lain pada dolar AS sebagai mata uang cadangan dan alat pembayaran internasional memberikan AS kekuatan yang besar dalam mengendalikan dan mempengaruhi kebijakan ekonomi negara-negara lain. Hal ini bertentangan dengan prinsip kemandirian ekonomi dan kedaulatan negara yang ditekankan dalam Islam. Negara-negara yang ingin membebaskan diri dari pengaruh politik dan ekonomi AS melihat mata uang BRICS sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS dan memperoleh kebebasan dalam pengambilan kebijakan ekonomi mereka.

Keterbatasan BRICS Currency sebagai Pengganti Dollar

Meskipun mata uang BRICS menawarkan potensi sebagai pengganti dolar AS, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Likuiditas mata uang BRICS masih terbatas dibandingkan dengan dolar AS. Dolar AS merupakan mata uang cadangan utama di dunia dan memiliki cakupan global yang luas. Sebagai alternatif, mata uang BRICS masih perlu memperluas basis penggunaannya dan meningkatkan likuiditasnya agar dapat diadopsi secara luas oleh negara-negara dan lembaga keuangan internasional (Rao & Padhi, 2020).

Transparansi dan kredibilitas lembaga keuangan BRICS masih menjadi perhatian. Meskipun BRICS telah membentuk Bank Pembangunan BRICS dan Dana Cadangan Valuta Asing BRICS, lembaga-lembaga ini masih perlu membuktikan diri dalam hal kepercayaan dan akuntabilitas. Ketika negara-negara mencari alternatif terhadap dolar AS, mereka cenderung mencari lembaga keuangan yang terpercaya dan berintegritas tinggi. Oleh karena itu, BRICS perlu mengatasi tantangan ini untuk memperoleh kepercayaan dan menjadi pilihan yang menarik bagi negara-negara lain (Rehman & Islam, 2023).

Stabilitas ekonomi dan politik di negara-negara anggota BRICS juga memengaruhi persepsi dan penerimaan terhadap mata uang mereka. Ketidakstabilan ekonomi atau ketegangan politik dalam salah satu negara BRICS dapat mengganggu kepercayaan dan stabilitas mata uang kelompok. Oleh karena itu, negara-negara anggota BRICS perlu memastikan keberlanjutan dan kestabilan dalam kebijakan ekonomi dan politik mereka, sehingga mata uang BRICS dapat dianggap sebagai alternatif yang dapat diandalkan dalam jangka panjang (Maldonado et al., 2018).

SIMPULAN

BRICS adalah forum kerjasama global yang bersifat non-formal yang meliputi beberapa negara-negara EME (*Emerging Market Economy*) tertentu dengan pertumbuhan ekonomi pesat yang tergabung pada satu grup, yakni: Brazil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Negara anggota BRICS berpotensi besar mempengaruhi sistem moneter global dalam menekan hegemoni dolar AS. Kendati demikian, dalam pandangan ahli ekonomi potensi adanya mata uang BRICS dinilai kurang potensial karena membutuhkan infrastruktur keuangan yang besar dan harus mampu bersaing dengan Bank Dunia. sehingga dalam menjalankan rencana itu BRICS seharusnya mempertimbangkan bekerjasama dan berkolaborasi dengan negara Muslim untuk menerapkan sistem keuangan Islam Mata uang yang memiliki prinsip menciptakan sistem keuangan yang adil, berkelanjutan, dan mandiri bagi masyarakat

REFERENSI

- Abdallah, M. (2022). When a Crisis Empties Mosques: A Case Study of Muslim Responses to the Pandemic's Challenges in Regards to Spiritual Care and Communal Rituals in Austria and Germany. *International Journal of Practical Theology*, 26(2), 223–239. <https://doi.org/10.1515/ijpt-2021-0034>
- Agustianti, R., Nussifera, L., Angelianawati, L., Meliana, I., Sidik, E. A., Nurlaila, Q., Simarmata, N., Himawan, I. S., Pawan, E., & Ikhrum, F. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Tohar Media.
- Alam, A., Tri Ratnasari, R., Mua'awanah, C., & Aribatul Hamidah, R. (2022). Generation Z perceptions in paying Zakat, Infaq, and Sadaqah using Fintech: A comparative study of Indonesia and Malaysia. *Investment Management and Financial Innovations*, 19(2), 320–330. [https://doi.org/10.21511/imfi.19\(2\).2022.28](https://doi.org/10.21511/imfi.19(2).2022.28)
- Arapova, E. Y., & Lissovolik, Y. D. (2021). The BRICS plus cooperation in international organizations: Prospects for reshaping the global agenda. *Asia-Pacific Social*

- Science Review*, 21(4), 192–206. Scopus.
- Aroul, R. R., & Swanson, P. E. (2018). Linkages Between the Foreign Exchange Markets of BRIC Countries—Brazil, Russia, India and China—And the USA. *Journal of Emerging Market Finance*, 17(3), 333–353. <https://doi.org/10.1177/0972652718800081>
- Asfarina, M., Ascarya, A., & Beik, I. S. (2019). RE-ESTIMATING THE ZAKAT POTENTIAL IN INDONESIA BASED ON CLASSICAL AND CONTEMPORARY FIQH APPROACHES. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 5(2). <https://doi.org/10.21098/jimf.v5i2.1068>
- Bag, R., & Das, R. C. (2024). Associations of trade openness with growth and foreign currency reserve: A new insight for the BRICS nations. In *Int. Trade, Econ. Crisis and the Sustain. Dev. Goals* (pp. 243–256). Emerald Group Publishing Ltd.; Scopus. <https://doi.org/10.1108/978-1-83753-586-620241017>
- Belke, A., & Kronen, D. (2019). Exchange rate bands of inaction and hysteresis in EU exports to the global economy: The role of uncertainty. *Journal of Economic Studies*, 46(2), 335–355. Scopus. <https://doi.org/10.1108/JES-01-2018-0022>
- Bidin, Z., Idris, K. Md., & Shamsudin, F. M. (2009). Predicting compliance intention on zakah on employment income in malaysia: An application of reasoned action theory. *Jurnal Pengurusan*, 28, 85–102. Scopus. <https://doi.org/10.17576/pengurusan-2009-28-05>
- Caporale, G. M., Spagnolo, F., & Spagnolo, N. (2017). Macro news and exchange rates in the BRICS. *Finance Research Letters*, 21, 140–143. Scopus. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2016.12.002>
- Cooper, A. F. (2017). The BRICS' New Development Bank: Shifting from Material Leverage to Innovative Capacity. *Global Policy*, 8(3), 275–284. Scopus. <https://doi.org/10.1111/1758-5899.12458>
- Coquidé, C., Lages, J., & Shepelyansky, D. L. (2023). Prospects of BRICS currency dominance in international trade. *Applied Network Science*, 8(1). Scopus. <https://doi.org/10.1007/s41109-023-00590-3>
- De Callataÿ, F. (2013). Why the “gold distater with a portrait of Alexander” is probably a contemporary forgery. *Revue Numismatique*, 170, 175–189. Scopus. <https://doi.org/10.3406/numi.2013.3204>
- Dharma, F. P., Anwar, N., & Syaifullah, S. (2024). Technology Advances and Innovation in Wine Tourism: New Managerial Approaches and Cases: edited by Marianna Sigala, Coralie Haller, Singapore, Springer, 2023, 289 pages, EUR 149.99 (hardback), ISBN 978-981-19-8276-7. *European Planning Studies*, 32(6), 1442–1444. <https://doi.org/10.1080/09654313.2023.2293898>
- Diniz-Maganini, N., Rasheed, A. A., & Sheng, H. H. (2023). Price efficiency of the foreign exchange rates of BRICS countries: A comparative analysis. *Latin American Journal of Central Banking*, 4(1). Scopus. <https://doi.org/10.1016/j.latecb.2022.100081>
- Hasan, N. F., & Syahrudin, S. (2022). Enhancing Green Waqf For Carbonization Technology: Opportunities for Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia. *El Barka: Journal of Islamic* <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/elbarka/article/view/4739>
- He, Y., Nakajima, T., & Hamori, S. (2020). Can brics's currency be a hedge or a safe haven for energy portfolio- an evidence from vine copula approach. *Singapore Economic Review*, 65(4), 805–836. Scopus. <https://doi.org/10.1142/S0217590820500174>
- Larionova, M., & Shelepov, A. (2022). BRICS, G20 and global economic governance reform. *International Political Science Review*, 43(4), 512–530.

<https://doi.org/10.1177/01925121211035122>

- Latino, A. (2017). The new development bank: Another BRICS in the wall? In *Account., Transpar. And Democr. In the Funct. Of Bretton Woods Inst.* (pp. 47–69). Springer International Publishing; Scopus. https://doi.org/10.1007/978-3-319-57855-2_4
- Maldonado, W. L., Tourinho, O. A. F., & de Abreu, J. A. B. M. (2018). Cointegrated Periodically Collapsing Bubbles in the Exchange Rate of “BRICS.” *Emerging Markets Finance and Trade*, 54(1), 54–70. Scopus. <https://doi.org/10.1080/1540496X.2016.1229179>
- Mittal, A., Sehgal, S., & Mittal, A. (2019). Dynamic currency linkages between select emerging market economies: An empirical study. *Cogent Economics and Finance*, 7(1). Scopus. <https://doi.org/10.1080/23322039.2019.1681581>
- Mroua, M., & Trabelsi, L. (2020). Causality and dynamic relationships between exchange rate and stock market indices in BRICS countries: Panel/GMM and ARDL analyses. *Journal of Economics, Finance and Administrative Science*, 25(50), 395–412. Scopus. <https://doi.org/10.1108/JEFAS-04-2019-0054>
- Naresh, G., Vasudevan, G., Mahalakshmi, S., & Thiyagarajan, S. (2018). Spillover effect of US dollar on the stock indices of BRICS. *Research in International Business and Finance*, 44, 359–368. Scopus. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2017.07.105>
- Nuryadin, M. F. L., Pangeran, M. R., & Syaifullah, S. (2023). THE ANTECEDENTS OF EMPLOYEE GREEN BEHAVIOUR IN THE SOCIETY 5.0 ERA. *FINANCIAL: JURNAL AKUNTANSI*, 9(1), 112–119.
- Peter Leo Deepak, J., & Amudha, R. (2017). Impact of forex swap among BRICS: Post global financial crisis. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 9(Special Issue 7), 224–229. Scopus.
- Phiri, A. (2022). Changing efficiency of BRICS currency markets during the COVID-19 pandemic. *Economic Change and Restructuring*, 55(3), 1673–1699. Scopus. <https://doi.org/10.1007/s10644-021-09363-3>
- Qabhobho, T. (2023). Assessing the Asymmetric Effect of Local Realized Exchange Rate Volatility and Implied Volatilities in Energy Market on Exchange Rate Returns in BRICS. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 13(2), 231–239. Scopus. <https://doi.org/10.32479/ijeep.13685>
- Rao, B. M., & Padhi, P. (2020). Macroeconomic costs of currency crises in BRICS: an empirical analysis. *Macroeconomics and Finance in Emerging Market Economies*, 13(3), 223–243. Scopus. <https://doi.org/10.1080/17520843.2020.1749103>
- Rehman, F. U., & Islam, M. M. (2023). Financial infrastructure—total factor productivity (TFP) nexus within the purview of FDI outflow, trade openness, innovation, human capital and institutional quality: Evidence from BRICS economies. *Applied Economics*, 55(7), 783–801. <https://doi.org/10.1080/00036846.2022.2094333>
- Saji, T. G. (2019). Can BRICS Form a Currency Union? An Analysis under Markov Regime-Switching Framework. *Global Business Review*, 20(1), 151–165. Scopus. <https://doi.org/10.1177/0972150917721835>
- Syaifullah, S., Sari, N. S., & Hasniati, H. (2024). Capitalism in the UK: A perspective from marxist political economy **Capitalism in the UK: a perspective from marxist political economy** by Mike Campbell, Routledge, 2023, 206 Pages, USD 111,12(Hardback), ISBN: 9781032422121: by Mike Campbell, Routledge, 2023, 206 Pages, USD 111,12 (Hardback), ISBN: 9781032422121. *Review of Political Economy*, 1–4. <https://doi.org/10.1080/09538259.2024.2312354>
- Thaker, M. M. T. (2018). A qualitative inquiry into cash waqf model as a source of financing for micro enterprises. *ISRA International Journal of Islamic ...*, Query date: 2024-04-24 16:45:41. <https://doi.org/10.1108/IJIF-07-2017-0013>

- Topcu, E., Altinoz, B., & Aslan, A. (2020). Global evidence from the link between economic growth, natural resources, energy consumption, and gross capital formation. *Resources Policy*, 66, 101622.
- Triyawan, A., Ahmad, N., Haris, A., & Hadi, N. A. (2022). *The Implementation of Productive Waqf in Pesantren Gontor*. Fakultas Ekonomi dan Muamalat
- Wang, T., Li, Y., Kang, M., & Zheng, H. (2019). Exploring individuals' behavioral intentions toward donation crowdfunding: Evidence from China. *Industrial Management & Data Systems*, 119(7), 1515–1534. <https://doi.org/10.1108/IMDS-10-2018-0451>
- Yuan, C., & Chen, R. (2015). Policy transmissions, external imbalances, and their impacts: Cross-country evidence from BRICS. *China Economic Review*, 33, 1–24. Scopus. <https://doi.org/10.1016/j.chieco.2014.12.006>